

TANGGUNGJAWAB PROFESI ARSITEK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DAN HUKUM MALAYSIA

Oleh
Elsi Kartika Sari*)

Abstrak

Pembangunan tidak sekedar menjadi tanggungjawab pemerintah setempat tetapi bagaimana peran arsitek sebagai perencana dan pengembang (kebetulan satu perusahaan walaupun beda nama). Bagi seorang arsitek merupakan hal yang mutlak dikuasai untuk dapat menggambarkan idea, gagasan atau imajinasinya tentang bangunan yang direncanakan. Untuk menciptakan dan membangun konstruksi bangunan atau rumah, seorang arsitek memadukan dan menggabungkan seni dan kreativitasnya dengan ketepatan perhitungan konstruksi bangunan. Dalam hal apapun arsitek lazimnya bekerja dalam tatacara praktek yang memegang teguh etika arsitek, kaidah tatalaku yang baik, bekerja secara mandiri dan menyuguhkan layanan jasanya secara profesional. Baik arsitek sebagai pekerja atau sebagai profesi harus mempunyai kode etik atau aturan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Tanggungjawab profesi arsitek dalam sistim Hukum Indonesia masih diatur dalam **Kode Etik Arsitek Dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek** yang dikeluarkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia sebagai kewajiban dan tanggung jawab seorang arsitek kepada masyarakat umum dan para pengguna jasa, terlihat apabila terjadi hubungan kerja antara arsitek dengan pemberi tugas berdasarkan perjanjian kerja, sehingga terlihat tanggung jawab dikarenakan pekerjaan sebagai seorang arsitek. Tanggungjawab profesi arsitek dalam sistim Hukum Malaysia, diatur dalam **ARSITEK ACT 1967**, diperbaruhi dengan **ARCHITECT ATURAN 1996** tentang tentang pendaftaran arsitek, sehingga Setiap Arsitek Professional, Lulusan Arsitek dan praktek konsultasi arsitektur harus tunduk pada UU ini. Dalam menjalankan layanan konsultasi arsitektur dilakukan pengawasan oleh Dewan Arsitektur Malaysia, apabila seorang arsitek yang melanggar ketentuan yang sudah di UU, maka oleh Dewan Arsitektur dianggap sebagai pelanggaran dikenakan denda paling banyak sepuluh ribu ringgit atau penjara tidak melebihi jangka waktu dua tahun atau untuk keduanya.

Kata Kunci : *Tanggung Jawab Profesi Arsitek*

A. PENDAHULUAN

Dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi

mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi ber-

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Jakarta

peran pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Dewasa ini, jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.

Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan.

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau Pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.

Perencanaan konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain yang dikenal dengan sebutan Arsitek.

Pada awal permulaannya, profesi arsitek merupakan profesi kelas tertentu dan merupakan profesi yang turun temurun dan atau melalui proses

pemagangan dalam waktu yang cukup lama. Revolusi Industri yang bermula di akhir abad ke 18 yang membawa perubahan besar dalam struktur ekonomi, sosial, dan teknologi juga memberikan dampak yang sangat besar di dalam arsitektur. Berubahnya struktur sosial di dalam masyarakat dimana kelas menengah mulai memiliki peranan di dalam ekonomi, dan banyak dibuatnya publikasi berkenaan dengan arsitektur, menjadikan profesi arsitektur tidak lagi menjadi profesi eksklusif kelas tertentu tetapi lebih terbuka bagi semua kalangan.

Di Indonesia sendiri, profesi arsitek 'modern' mulai dikenal ketika para arsitek kebangsaan Belanda yang menempuh pendidikan dan pelatihan arsitektur di Eropa, kembali dan berpraktek di Indonesia. Sedangkan pendidikan arsitektur formal pertama di Indonesia dibuka di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1950, dan mulai menelurkan lulusannya di tahun 1958. Sebelum itu, bangsa Indonesia yang berprofesi sebagai arsitek mempelajari ilmunya dengan bekerja pada para arsitek Belanda.

Di Indonesia, asosiasi profesi arsitek terbentuk pada 17 September 1959 yang dipicu oleh dikeluarkannya instruksi pemerintah untuk membentuk gabungan perusahaan sejenis yang dimaksudkan selain untuk memudahkan komunikasi antara pemerintah dengan dunia pengusaha, juga diharapkan dapat menentukan suatu standar kerja bagi para pelakunya.

Penciptaan hasil karya arsitek yang didasari atas fungsional, estetis dan kepuasan pemakai/owner adalah tuntutan dari dalam profesi arsitektur. Ada tuntutan dari luar yang kadang tidak nampak langsung keterkaitannya, namun sangat besar dampaknya, dalam hal ini lingkungannya.

Pembangunan tidak sekedar menjadi tanggungjawab pemerintah setempat tetapi bagaimana peran arsitek sebagai perencana dan pengembang (kebetulan satu perusahaan walaupun beda nama). Bagi seorang arsitek merupakan hal yang mutlak dikuasai untuk dapat menggambarkan idea, gagasan atau imajinasinya tentang bangunan yang direncanakan. Bilamana arsitek yang bersangkutan tidak tanggap dan peka terhadap kondisi lingkungan alam, maka wujud arsitektur dengan elemen perangkat di dalamnya akan tidak berfungsi secara baik.

Dalam merancang, arsitek secara langsung atau pun tidak langsung bertanggung jawab atas hasil karya arsitektur yang dibuatnya suatu karya yang baik haruslah mengemban misi yang ingin disampaikan arsitekturnya dan mampu diterima masyarakat, lingkungan dan zamannya.

Bagaimana tanggungjawab profesi arsitek dalam sistem hukum Indonesia dan hukum Malaysia?

B. PEMBAHASAN

Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang, oleh karena itu dalam pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku.

Dalam Kamus Teknik Umum, *Bangunan* merupakan pekerjaan yang didirikan menurut rencana yang disesuaikan dengan keperluan masyarakat, seperti bangunan gedung, jembatan, jalan dan sebagainya, menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2002 jo Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005, yang dinamakan *Bangunan Gedung* adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian/seluruhnya berada di atas

dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air yang berfungsi sebagai tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya maupun kegiatan khusus.

Perwujudan bangunan gedung harus memenuhi persyaratan baik penampilan bangunan, keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan perkembangan arsitektur dan rekayasa.

Sementara itu, persyaratan teknis bangunan gedung dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.

1. Ruang lingkup persyaratan tata bangunan yaitu meliputi:¹

- a) Persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, yaitu berhubungan dengan persyaratan peruntukan lokasi bangunan gedung yang tidak boleh mengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum, serta ketinggian gedung;
- b) Arsitektur bangunan gedung; dan
- c) Persyaratan pengendalian dampak lingkungan, yaitu persyaratan pengendalian dampak lingkungan yang hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Persyaratan terhadap dampak lingkungan ini sendiri berpedoman pada undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur tentang kewajiban setiap usaha dan/atau

¹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/Prt/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup untuk wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

2. Persyaratan keandalan bangunan gedung, persyaratan ini ditetapkan berdasarkan fungsi masing-masing bangunan gedung yang secara umum meliputi persyaratan:

- a) Keselamatan, yaitu berkenaan dengan persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dengan melakukan pengamanan terhadap bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif serta bahaya petir melalui sistem penangkal petir;
- b) Kesehatan, yaitu berkenaan dengan persyaratan sistem sirkulasi udara, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung;
- c) Kenyamanan, yaitu berkenaan dengan kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan; dan
- d) Kemudahan, yaitu berkenaan dengan kemudahan akses bangunan gedung, termasuk tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi penyandang cacat dan lanjut usia, serta penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir,

tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi.

Profesi merupakan identifikasi secara khusus dari bentuk pekerjaan, tentunya karena kekhususannya memiliki kriteria-kriteria sehingga suatu pekerjaan dapat dikategorikan sebagai suatu profesi. Menurut Abdul Kadir kriteria dari profesi meliputi:²

1. Meliputi bidang tertentu saja (terspesialisasi), dimana dikaitkan dengan bidang keahlian yang dipelajari dan ditekuni.
2. Berdasarkan keahlian dan ketrampilan khusus, pekerja yang mempunyai pekerjaan di bidang tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus, yang diperolehnya melalui pendidikan dan latihan yang diakui oleh pemerintah (Negara) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana keahlian dan keterampilan dibuktikan oleh sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau lembaga lain yang diakui oleh pemerintah.³
3. Bersifat tetap atau terus menerus, bahwa pekerjaan tersebut bersifat tetap (tidak berubah-ubah pekerjaan) atau terus menerus, yang berarti berlangsung untuk jangka waktu lama atau berakhir masa kerja profesi.
4. Mendahulukan pelayanan, yang berarti mendahulukan apa yang harus dikerjakan, bukan berapa bayaran yang diterima, dan tidak melanggar hak pihak lain.

² Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hal 57-58

³ Ismantoro Dwi Y, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hal 9

5. Tanggung jawab, dimana professional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan professional sebagai dalam kehidupannya, serta bertanggungjawab kepada masyarakat artinya kesediaan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma. Bertanggung jawab menanggung segala risiko yang timbul akibat yang membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain dan bagi yang percaya pada agama, berdoda kepada Tuhan.
6. Terkelompok dalam suatu organisasi, merupakan wadah bagi para profesional yang terkelompok dalam suatu organisasi menurut bidang keahlian dari cabang ilmu yang dikuasai yang memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Pengakuan terhadap organisasi profesi didasarkan pada nilai moral yang tercermin pada keahlian dan keterampilan anggota profesi yang bersangkutan, bukan karena ketentuan hukum positif.

Blankenship mendefinisikan profesi melalui karakteristik umum yang biasa terlihat. Profesi adalah (1) pekerjaan penuh waktu (2) yang melalui pendidikan/pelatihan khusus (3) memiliki organisasi profesi (4) mempunyai komponen izin kerja (lisensi) dan pengakuan dari masyarakat (5) mempunyai kode etik dan hak pengelolaan mandiri ⁴

Pekerjaan teknik yang sangat membutuhkan seni dan kreativitas adalah profesi arsitek. Tugas seorang arsitek adalah menerjemahkan keinginan klien untuk membangun

rumah atau bangunan lainnya. Untuk menciptakan dan membangun konstruksi bangunan atau rumah, seorang arsitek memadukkan dan menggabungkan seni dan kreativitasnya dengan ketepatan perhitungan konstruksi bangunan

Arsitek adalah perseorangan atau badan usaha yang dengan menggunakan keahliannya dan berdasarkan suatu pemberian tugas mengerjakan perencanaan, perancangan dan pengawasan pembangunan, memberikan nasehat atau jasa-jasa lain yang berhubungan dengan perancangan dan pengawasan gedung, tata ruang dalam pertamanan, perancangan kota, pembagian kota dan jalan-jalan dan jembatan

Arsitek bekerja dengan keahliannya memenuhi permintaan pengguna jasa baik itu orang perorangan, sekelompok orang maupun badan tertentu, atau masyarakat luas. Dalam hal apapun arsitek lazimnya bekerja dalam tatacara praktek yang memegang teguh etika arsitek, kaidah tatalaku yang baik, bekerja secara mandiri dan menyuguhkan layanan jasanya secara profesional. Dengan demikian arsitek diharapkan akan menghasilkan karya yang mempunyai nilai seni arsitektur yang tinggi, memenuhi kebutuhan fungsional pengguna bangunannya dan dengan tetap mengutamakan masyarakat luas sebagai kepentingan yang utama, sehingga dalam melaksanakan tugas arsitek harus mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan yang dianggap sudah diketahui oleh seorang arsitek.

Tugas arsitek adalah sebagai berikut:⁵

⁴ Dana Cuff, *Architecture : The Story of Practice*, 1992, p23

⁵ Opcit... hal 466-467

1. Mendiskusikan tujuan, persyaratan dan anggaran suatu proyek,
2. Memberikan pelayanan prakonstruksi yang dapat mencakup studi kelayakan dan studi dampak lingkungan,
3. Membuat rancangan desain yang diinginkan klien,
4. Menyiapkan gambar agar klien bisa mengerti rencana proyek,
5. Mengembangkan rencana konstruksi akhir yang menunjukkan penampilan bangunan serta rincian untuk konstruksi,
6. Melakukan perubahan yang diperlukan selama proses perencanaan.

Setelah tahap desain selesai, arsitek bergerak menjadi pengawas dalam proyek bangunan. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi dalam pembangunan, arsitek perlu menggantikan rencana, berkomunikasi ke kontraktor dan klien dan kemudian mengubah anggaran untuk memenuhi tantangan tersebut. Arsitek harus memastikan bahwa bangunan yang mereka bangunan fungsional, aman, ekonomis dan sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang menggunakannya.

Dalam pekerjaan pembangunan, arsitek dapat dikatakan seorang leader atau koordinator pembangunan, khususnya terhadap bangunan yang direncanakan dan dirancangnya. Untuk melakukan perencanaan pekerjaan pembangunan, seorang arsitek harus memerlukan bantuan dari para pihak secara multidisiplin, sehingga mengharuskan seorang arsitek memadukan seluruh tim untuk mewujudkan karya yang untuk, tepat dan berhasil guna. Baik arsitek sebagai pekerja atau sebagai profesi harus mempunyai kode etik atau aturan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Kode Etik Profesi merupakan bagian dari etika profesi.

Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, memperkuat dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional.

A. Tanggungjawab Profesi Arsitek dalam Sistem Hukum Indonesia

Untuk menciptakan dan membangun konstruksi bangunan atau rumah, seorang arsitek memadukan dan menggabungkan seni dan kreativitasnya dengan ketepatan perhitungan konstruksi bangunan. Tugas seorang arsitek adalah menerjemahkan keinginan klien untuk membangun rumah atau bangunan lainnya.

Arsitek harus memastikan bahwa bangunan yang mereka bangun fungsional, aman, ekonomis dan sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang menggunakannya, sehingga baik buruk perkembangan bangunan yang paling bertanggung jawab adalah para arsitek, oleh karena itu berhasil atau gagalnya suatu proses pembangunan atau penciptaan karya, akan menyangkut kemampuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang arsitek dalam pekerjaan pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya.

Arsitek adalah sebutan ahli yang mempunyai latar belakang atau dasar pendidikan tinggi Arsitektur dan atau yang setara serta mempunyai kompetensi yang diakui, melakukan praktek Profesi Arsitek, sesuai ketentuan organisasi profesi arsitek - Ikatan Arsitek Indonesia (yang selanjutnya disebut IAI) serta telah memiliki Sertifikat IAI, sedangkan Profesi Arsitek adalah keahlian dan kemampuan penerapan dibidang perencanaan perancangan arsitektur dan pengelolaan proses pembangunan lingkungan binaan yang diperoleh melalui pendidikan tinggi arsitektur dan atau yang diakui oleh Organisasi serta dari pengalaman penerapan pengetahuan ilmu dan seni tersebut, yang menjadi nafkah dan ditekuni secara terus-menerus dan berkesinambungan.

Seorang arsitek merupakan seorang yang berprofesi yang tunduk terhadap suatu peraturan yang dikeluarkan oleh suatu organisasi profesi.

Di Indonesia setiap arsitek merupakan anggota daripada Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Semua anggota IAI menaati dan mematuhi **Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Profesi Arsitek** yang menunjukkan kewajiban dan tanggung jawab seorang arsitek kepada masyarakat umum dan para pengguna jasa.

Kaidah dalam Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek di Indonesia mencakup 3 (tiga) hal yaitu:⁶

- a. Kaidah Dasar merupakan kaidah pengarahan secara luas sikap beretika seorang arsitek,

- b. Standar Etika merupakan tujuan yang lebih spesifik dan baku yang harus ditaati dan diterapkan oleh anggota dalam bertindak dan berprofesi,
- c. Kaidah Tata Laku bersifat wajib untuk ditaati, pelanggaran terhadap kaidah tata laku akan dikenakan tindakan, sanksi keorganisasian.

Sebagai professional, arsitek selalu menaati perangkat etika, yang bersumber pada nilai luhur keyakinan spiritual yang dianutnya sebagai pedoman berpikir, bersikap dan berperilaku dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawab profesionalnya.

Dalam melaksanakan tugasnya seorang arsitek, maka Dewan Kehormatan IAI memiliki tata kerja dan kode etik yang harus taati oleh seluruh anggota Dewan Kehormatan IAI pada lingkup nasional maupun daerah.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Menentukan norma-norma etika dan tata laku profesi arsitek, serta menilai dan memutuskan perlu tidaknya dilakukan penyempurnaan atau perubahan terhadap ketentuan Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek.
2. Menentukan dan memberi arahan dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan program pengembangan keprofesionalan anggota, khususnya Penataran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek.
3. Menetapkan tata cara persidangan, dalam memutuskan dan menilai masalah-masalah yang menyangkut pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek, arbitrase/

⁶ Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek, IAI, edisi ke empat, Jakarta, 2007

hubungan kerja, maupun menyangkut persyaratan keanggotaan untuk status Anggota Profesional.

4. Meminta pihak-pihak lain yang dianggap perlu baik dari dalam maupun luar IAI untuk dapat mengemukakan pendapat/keterangan dalam persidangan, atau membantu Dewan Kehormatan IAI dalam tugasnya pada lingkup nasional/daerah/cabang.
5. Menetapkan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek, dan meneruskan kepada Pengurus Nasional/Daerah/Cabang untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan kewenangan dalam lingkup masing-masing.

Secara umum para arsitek memiliki kewajiban dan tanggung jawab selalu menjunjung tinggi dan meningkatkan nilai-nilai budaya dan arsitektur serta menghargai dan ikut berperan serta dalam mempertimbangkan segala aspek social dan lingkungan untuk setiap kegiatan profesionalnya dan menolak hal-hal yang tidak profesional dan seorang arsitek wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dalam setiap upaya menegakkan profesinya, sedangkan dalam menjalankan kegiatan profesionalnya arsitek bersikap tidak membedakan seseorang/golongan atas dasar penilaian ras/suku, agama, kebangsaan, cacat atau orientasi gender⁷.

Arsitek wajib menjunjung tinggi tatanan hukum dan peraturan terkait dalam menjalankan kegiatan profesinya, sehingga dalam menjalankan tugasnya seorang arsitek

harus dilaksanakan secara profesional dengan tanggung jawab, kecakapan dan kepakaran, oleh karena itu seorang arsitek hanya akan menerima penunjukan akan suatu pekerjaan jika ia mempunyai kualifikasi meyakini memiliki cukup kecakapan serta kepakaran, sumber pendanaan dan sumber ketrampilan teknis yang mendukung pelaksanaan setiap bagian kewajiban dari penugasan, sehingga arsitek wajib berlaku jujur dan menyampaikan kegiatan profesionalnya serta senantiasa memperbaharui setiap informasi tentang penugasan yang sedang dikerjakan kepada pengguna jasa.

Arsitek tidak dibenarkan menandatangani atau mengesahkan gambar, spesifikasi, laporan atau dokumen kerja lainnya yang tidak berada di bawah tanggung jawab yang terkendali⁸, menyebabkan arsitek tidak dibenarkan membuat pernyataan yang menyesatkan, keliru atau palsu mengenai kualifikasi keprofesian, pengalaman kerja atau penampilan kerja, serta mampu menyampaikan secermat lingkup dan tanggung jawab yang terkait dengan pekerjaan yang diakui sebagai karyanya, oleh karena itu setiap arsitek tidak dibenarkan bermitra dengan seseorang yang sudah tidak terdaftar di asosiasi profesi atau tidak memenuhi syarat sebagai anggota organisasi profesi arsitek yang diakui.

Arsitek berkewajiban mengakui hak-hak dan menghargai aspirasi profesional⁹ tanpa membedakan rekan sejawat atas dasar ras, agama, kekuranganmampuan fisik, cacat badan, maupun gender serta tidak

⁷ Kaidah Dasar 1

⁸ Kaidah Tata Laku 4

⁹ Kaidah Tata Laku 5

dibenarkan untuk mengambil alih hak intelektual atau memanfaatkan karya/kreasi atau ide dari arsitek lain tanpa izin yang jelas dari arsitek pemilik gagasan tersebut dan seorang arsitek hendaknya tidak akan melecehkan karya arsitek lain dengan tujuan untuk menguntungkan pihak tertentu dengan cara tidak adil dalam forum terbuka atau media massa.

Kewajiban dan Tanggungjawab Arsitek¹⁰

Dalam melakukan tugas profesi, maka arsitek mempunyai kewajiban antara lain sebagai berikut :

- a. Memberikan keahlian dan kemampuannya sesuai dengan standar kinerja keahlian arsitek bersertifikat IAI serta wajib tunduk pada Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi arsitek.
- b. Memenuhi syarat-syarat Kerangka Acuan Kerja/KAK Perencanaan Perancangan yang ditentukan oleh Pengguna Jasa pada setiap tahap pekerjaan, kecuali apabila syarat-syarat tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Arsitek dan mengenai hal tersebut telah diberitahukan kepada Pengguna Jasa sebelum atau pada waktu pelaksanaan pekerjaan.
- c. Mengindahkan dan menguasai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi terlaksanannya penyelenggaraan konstruksi.
- d. Melakukan tugas koordinasi pekerjaan perencanaan perancangan dengan ahli atau sekelompok ahli/ konsultan

lainnya, baik yang ditunjuk langsung oleh Pengguna Jasa ataupun oleh Arsitek, agar proses perencanaan perancangan dapat memenuhi sasaran mutu, waktu dan biaya.

- e. Ketidaksempurnaan/ kesalahan pekerjaan dalam bidang perencanaan perancangan menjadi tanggungjawab masing-masing ahli/ konsultan bidang yang bersangkutan.
- f. Melakukan pengawasan berkala atau pemeriksaan konstruksi, agar konstruksi dilaksanakan sesuai dengan gambar-gambar perencanaan perancangan, rencana kerja dan syarat-syarat / RKS serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

Hak dan Wewenang Arsitek¹¹

Dalam melakukan tugas profesionalnya, maka Arsitek berhak dan berwenang:

- a. Mendapatkan Imbalan Jasa atas layanan jasa profesional yang telah dikerjakan sesuai ketentuan yang berlaku
- b. Mendapatkan Imbalan Jasa tambahan apabila Pengguna Jasa melakukan penambahan penugasan atau melakukan permintaan perubahan perencanaan perancangan atas rancangan yang telah disetujui sebelumnya.
- c. Menolak segala bentuk penilaian estetika atas hasil karyanya oleh Pengawas Terpadu ataupun oleh Pengguna Jasa.
- d. Mengembalikan penugasan yang telah diberikan kepadanya karena alasan-alasan:

Pertimbangan dalam dirinya:

¹⁰ Pasal 28 ayat 1 Pedoman Hubungan Kerja antara Arsitek dan Pemberi Tugas

¹¹ Pasal 28 ayat 2 Pedoman Hubungan Kerja antara Arsitek dan Pemberi Tugas

- 1) akibat hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak (force Majeure)
 - 2) akibat kelalaian Pengguna Jasa Penyelesaian akibat-akibat yang timbul dari pengembalian tugas tersebut diatur dalam Bab Ketentuan Imbalan Jasa.
- e. Mengajukan perubahan perencanaan perancangan dan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk memenuhi persyaratan konstruksi dan segera menginformasikan kepada Pengguna Jasa atas perubahan tersebut, termasuk perubahan waktu dan biaya yang diakibatkan atas perubahan tersebut yang akan menjadi beban pihak Pengguna Jasa.
- f. Dalam pengawasan berkala arsitektur, maka Arsitek mempunyai hak dan wewenang untuk :
- 1) Memerintahkan Pelaksana Konstruksi secara tertulis melalui Pengawas Terpadu untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Jasa, dengan syarat jumlah biaya pekerjaan tambahan tersebut tidak melebihi biaya yang telah dialokasikan untuk pekerjaan tersebut, dan atau tidak melebihi biaya yang dialokasikan untuk pekerjaan tidak terduga, dan atau tidak melebihi 10 % dari biaya konstruksi.
 - 2) Menilai pembayaran angsuran tahap pekerjaan konstruksi yang telah diselesaikan dan menjadi hak Pelaksana Konstruksi, sesuai dengan penilaian besarnya bobot prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan sampai dengan

waktu tertentu, yang kemudian direkomendasikan kepada Pengguna Jasa untuk melaksanakan pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi.

Tanggung Jawab Arsitek

Adapun tanggungjawab timbul didasarkan karena adanya perjanjian Tertulis adalah perjanjian-hubungan kerja antara Pemberi Tugas dan Arsitek yang mempunyai kekuatan hukum, dan di dalamnya dicantumkan keterangan-keterangan yang jelas dan tegas tentang macam, luas, batas-batas dan lingkup pekerjaan. Penetapan batas waktu penugasan. Besarnya imbalan jasa dan penggantian biaya serta cara-cara pembayarannya, sehingga menimbulkan tanggung jawab dari arsitek. Adapun tanggungjawab berikut ini:

- a. Arsitek bertanggung jawab untuk kerugian yang kesalahan-kesalahannya dibuat oleh Arsitek atau oleh orang-orang yang bekerja padanya pada waktu pelaksanaan tugas jika kesalahan-kesalahan itu dibuat dalam keadaan yang seharusnya dapat dihindarkan dengan keahlian dan kewaspadaan serta cara pelaksanaan tugas yang lazim.
- b. Tanggung Jawab untuk kesalahan-kesalahan dalam keadaan luar biasa.
Arsitek tidak bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang-orang yang bekerja padanya jika Arsitek dapat membuktikan bahwa kesalahan-kesalahan itu tidak dapat dihindarkan atau tidak dapat diketahui sebelumnya meskipun ada pengawasan kewaspadaan yang lazim dari Arsitek.
- c. Pembatasan Tanggung Jawab:

- 1) Tanggung jawab Arsitek untuk kesalahan-kesalahan tidak dapat lebih besar dari jumlah Imbalan Jasa yang harus diterima oleh orang-orang yang bekerja padanya, kecuali jika terjadi hal yang disebut pada point B bagian 1.2.5. Tanggung Jawab Arsitek.
- 2) Bila kesalahan-kesalahan itu disengaja oleh Arsitek maka Arsitek bertanggung jawab penuh untuk semua akibat kesalahan-kesalahan itu tanpa ada pembatasan.
- 3) Setiap tanggung jawab dari Arsitek akan gugur dengan sendirinya tiga tahun setelah tanggal penyelesaian bagian terakhir dari penugasan.

Hak Milik dan Hak Atas Kekayaan Intelektual

1. Hak Milik

- a. Hak kepemilikan atas setiap dokumen
Perencanaan Perancangan yang telah dibuat oleh Arsitek, dalam setiap kondisi akan tetap berada pada Arsitek, termasuk setelah penyelesaian proyek atau setelah pemutusan hubungan kerja, ataupun bila perencanaan perancangan telah diselesaikan tersebut tidak direalisasikan.
- b. Dokumen Perencanaan Perancangan tersebut baik sebagian maupun keseluruhan tidak diperkenankan digunakan oleh Pengguna Jasa untuk proyek lain ataupun ditambahkan pada proyek yang bersangkutan kecuali dengan suatu persetujuan tertulis dari Arsitek, dan dengan kesepakatan penambahan Imbalan Jasa atas penggunaan dokumen tersebut

sesuai dengan Ketentuan Imbalan Jasa.

2. Hak Perwujudan Rancangan

- a. Hak perwujudan adalah hak untuk merealisasikan/ mewujudkan suatu rancangan arsitektur menjadi suatu karya arsitektur.
- b. Pengguna Jasa mendapatkan hak perwujudan rancangan sebanyak 1 (satu) kali setelah memenuhi kewajiban membayar imbalan jasa atas penugasan untuk pembuatan perencanaan perancangan arsitektur dan segala sesuatu yang menyangkut penugasan tersebut kepada arsitek.
- c. Perwujudan ulang berdasarkan rancangan arsitektur dengan atau tanpa perubahan apapun, wajib memberitahukan dan dengan persetujuan tertulis dari arsitek dan dengan imbalan jasa sesuai ketentuan Imbalan Jasa perwujudan ulang rancangan arsitektur yang berlaku.

B. Tanggungjawab Profesi Arsitek dalam Sistem Hukum Malaysia

Di Malaysia telah dikeluarkan sebuah undang-undang yang menyediakan registrasi dari arsitektur, kepemilikan tunggal, kemitraan dan badan hukum yang menyediakan layanan konsultasi arsitektural, designer interior dan juru bangunan serta masalah-masalah yang diatur dalam **ARSITEK ACT 1967**, diperbarui dengan **ARCHITECT ATURAN 1996** tentang pendaftaran arsitek, sehingga Setiap Arsitek Profesional, Lulusan Arsitek dan praktek konsultasi arsitektur harus tunduk pada UU ini.

Praktek konsultasi arsitektural" berarti kepemilikan tunggal,

kemitraan atau badan korporasi yang diatur dalam undang-undang perusahaan 1965 (undang-undang 125)

Layanan konsultasi arsitektur adalah penyediaan layanan konsultasi arsitektural dan layanan yang berkaitan pada semua atau beberapa dari berikut:

- a. Pencapaian rencana atau gambaran untuk setiap orang maupun otorita lokal di Malaysia
- b. Konseptualisasi, penelitian, dan perkembangan dari setiap desain untuk pembangunan lingkungan
- c. Setiap survey, penyusunan laporan termasuk laporan penilaian dampak lingkungan, atau penyelidikan yang berkaitan dengan pembangunan lingkungan
- d. Pemograman proyek, konstruksi dan manufaktur pemograman, serta design produk
- e. Perencanaan dan perkembangan layanan termasuk design interior, layanan penasehat finansial, menejemen proyek, pengurusan kontrak dan lanskap
- f. Persiapan studi banyak raya dan perkiraan biaya
- g. Persiapan rencana dan pengertian presentasi lainnya
- h. Segala layanan dalam memenuhi ketentuan
- i. Dan segala macam aktifitas yang berkaitan dengan kreasi, pelestarian dan peningkatan pembangunan lingkungan

Dalam menjalankan layanan konsultasi arsitektur dilakukan pengawasan oleh Dewan Arsitektur Malayasia yang bertugas¹² untuk:

- a. Menjaga dan memelihara daftar arsitek profesional, arsitek

lulusan dan praktek konsultasi arsitektur

- aa. Menjaga dan memelihara daftar desainer interior dan bangunan juru
- b. Menjaga dan memelihara daftar desainer interior dan juru untuk menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran dalam undang-undang ini atau menyetujui setiap subjek aplikasi seperti kondisi atau pembatasan karena dapat dianggap cocok untuk memaksakan bangunan
- c. Memerintahkan penerbitan teguran tertulis, pengenaan suspensi, denda atau pembatalan pendaftaran, penghapusan dari atau penempatan kembali ke register yang sesuai dengan undang-undang ini
- d. Memperbaiki dari waktu ke waktu dengan persetujuan menteri skala biaya yang harus dibebankan oleh arsitek profesional, praktek konsultasi arsitektur dan juru bangunan untuk jasa konsultasi arsitektur diberikan
- da. *to fix from time to time with the approval of the minister the scale of fees to be charged by interior designers for interior design consultancy services rendered*
- e. Memeriksa dan memutuskan sengketa yang berkaitan dengan perilaku profesional atau etika arsitek profesional, arsitek lulusan, desainer interior dan juru bangunan dan untuk menunjuk sebuah komite, arbiter atau arbiter untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan tersebut
- ea. Untuk bertindak sebagai stakeholder dalam kontrak untuk jasa desain arsitektur

¹² Pasal 4 Arsitek Act 1967 junto Architect Aturan 1996

- dan interior konsultan, ketika diminta.
- eb. Untuk mengotorisasi setiap orang untuk menyelidiki komisi dari pelanggaran apa saja dalam undang-undang ini atau peraturan yang dibuat dalam undang-undang ini.
 - ec. Untuk mempekerjakan seseorang, yang dianggap perlu, untuk membantu Dewan dalam melaksanakan fungsi, wewenang dan tugas tunduk pada syarat dan kondisi karena dapat menentukan.
 - f. Menentukan dan mengatur perilaku dan etika arsitek profesional, arsitek lulusan, desainer interior dan juru bangunan.
 - g. Mewakili profesi dalam setiap masalah yang mungkin perlu atau dilakukan dan untuk memeriksa dan jika dianggap cocok untuk melaporkan pada undang-undang saat ini dan hal-hal lokal lainnya diserahkan kepadanya atau untuk membuat rekomendasi kepada pemerintah atau penguasa umum atau bangunan atau lembaga, tubuh atau masyarakat untuk waktu yang mewakili profesi
 - ga. Untuk ditunjuk sebuah dewan yang terdiri dari anggota dewan tersebut, arsitek profesional dan orang lain yang akan ditentukan oleh dewan, untuk melakukan pemeriksaan untuk masuk ke profesi dan pemeriksaan lainnya yang dianggap perlu oleh dewan
 - gb. Untuk menunjuk dewan, terdiri dari anggota dewan tersebut, arsitek profesional dan orang lain yang akan ditentukan oleh dewan, untuk memberikan saran dan mengatur semua hal yang berhubungan dengan pendidikan desain arsitektur dan interior termasuk sertifikasi dan pengakuan programmer tersebut
 - h. Menunjuk seseorang untuk mewakili pada setiap tubuh atau panel pemeriksa yang dapat ditunjuk oleh suatu badan, lembaga atau masyarakat untuk waktu yang mewakili profesi dan untuk membuat rekomendasi sehubungan dengan setiap ujian kualifikasi untuk masuk ke profesi
 - i. Mengangkat anggota dewan untuk duduk di manapun, komite dewan atau badan yang dibentuk untuk tujuan mempengaruhi profesi dan mengangkat members dewan untuk duduk di dewan insinyur dan dewan surveyor kuantitas yang sesuai dengan hukum yang relevan
 - j. Memberikan beasiswa dan fasilitas lain untuk memajukan pembelajaran dan pendidikan dalam kaitannya dengan arsitektur dan untuk menahan atau menyebabkan akan diadakan program pengembangan profesional untuk arsitek profesional, arsitek lulusan, desainer interior dan juru bangunan untuk lebih meningkatkan pengetahuan mereka dalam perkembangan terbaru yang berkaitan untuk profesi itu
 - k. Umumnya, untuk melakukan semua tindakan seperti itu, hal dan hal-hal sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang ini
- Setiap arsitektur wajib di daftar Arsitek Profesional, Sarjana Arsitek dan praktek konsultasi arsitektur harus dalam tiga bagian, yaitu:

- (a) Bagian A - yang memuat nama, alamat bisnis dan keterangan lain Arsitek Profesional;
- (b) Bagian B - yang memuat nama, alamat dan keterangan lain dari Arsitek Lulusan, dan
- (c) Bagian C - yang memuat nama, alamat dan keterangan lain dari praktek konsultasi arsitektur.

Dalam setiap proses hukum, sertifikat pendaftaran akan menjadi bukti yang meyakinkan bahwa orang tersebut, kepemilikan kemitraan, tunggal atau badan hukum bernama di dalamnya adalah seorang Arsitek Profesional, Sarjana Arsitek Interior Designer, Pembuat Skema Bangunan atau arsitektur atau interior desain praktek konsultasi

Pembatasan orang yang tidak terdaftar dan sarjana Arsitek.¹³

Tidak ada orang yang wajib, kecuali dia adalah seorang Arsitek Profesional

- a. Berlatih atau menjalankan usaha atau mengambil pekerjaan yang mengharuskan dia untuk melakukan jasa konsultasi arsitektur;
- aa. Berhak untuk menggambarkan dirinya atau menahan dirinya di bawah nama, gaya atau judul
 - i. Menanggung kata-kata "Arsitek Profesional" atau hal tersebut setara dalam bahasa lain, atau
 - ii. Mengingat kata lain apapun, dalam bahasa yang wajar dapat ditafsirkan bahwa ia adalah seorang Arsitek Profesional;
- b. Menggunakan atau menampilkan tanda-tanda, papan, kartu atau perangkat lain yang mewakili atau menyiratkan

¹³ Pasal 7 Arsitek Act 1967 junto Architect Aturan 1996

bahwa ia adalah seorang Arsitek Profesional;

- ba. Berhak untuk menggambarkan dirinya sebagai "Arsitek Profesional" dan menggunakan singkatan "Ar", sebelum namanya dan/atau singkatan setelah namanya atau dalam hubungan dengan namanya "P.Arch."; Atau
- c. Berhak untuk pulih dalam pengadilan apapun bentuk biaya apapun, biaya, remunerasi atau pertimbangan untuk jasa konsultasi arsitektur diberikan sebagai Arsitek Profesional.

Hak setiap Arsitektur¹⁴

- (1) Setiap Arsitek Profesional yang berada di Malaysia untuk tidak kurang dari seratus delapan puluh hari dalam satu tahun kalender dan praktek konsultasi arsitektur menyediakan jasa konsultasi arsitektur di Malaysia berhak untuk menyerahkan rencana atau gambar untuk setiap orang atau otoritas di Malaysia menurut kualifikasinya atau kualifikasi Arsitek Profesional dalam praktek konsultan arsitektur.
- (2) Tidak ada yang terkandung dalam hukum tertulis lainnya harus mencegah Arsitek Profesional atau praktek konsultasi arsitektur dari—
 - a. Membuat penilaian bangunan dan struktur, dan tumbuhan, mesin dan peralatan yang berhubungan dengan bangunan atau struktur yang berhubungan dengan tempat praktiknya yang profesional;
 - b. Mempersiapkan dan menyerahkan aplikasi untuk perse-

¹⁴ Pasal 8 Arsitek Act 1967 junto Architect Aturan 1996

- tujuan rencana, konversi, subdivisi dan penggabungan tata letak gambar;
- c. Melakukan studi perencanaan studi dampak lingkungan yang berkaitan dengan penggunaan lahan, dan
 - d. Mempersiapkan laporan perencanaan untuk setiap orang atau otoritas di Malaysia.
- (3) Tidak ada dalam subbagian (1) dan (2) wajib mempengaruhi hak setiap surveyor kuantitas, insinyur, surveyor tanah berlisensi, penilai, penilai dan profesional lainnya untuk kali yang terdaftar berdasarkan hukum yang relevan berkaitan dengan profesi seperti itu, untuk melakukan kegiatan apapun yang berhubungan dengan praktek profesionalnya.

Hukuman, memperoleh pendaftaran dengan alasan palsu, dll.¹⁵

Setiap orang, kepemilikan kemitraan, tunggal atau badan hukum yang:

- (a) diperolehnya atau mencoba untuk mendapatkan pendaftaran atau sertifikat pendaftaran berdasarkan Undang-undang ini dengan sengaja membuat atau memproduksi atau menyebabkan harus dibuat atau diproduksi deklarasi palsu atau penipuan, sertifikat, aplikasi atau representasi apakah di peras atau yang lainnya;
- (b) sengaja membuat atau menyebabkan harus dibuat setiap pemalsuan dalam Daftar disimpan dan dipelihara dalam Undang-Undang ini;

- (c) menempa, mengubah atau palsu sertifikat pendaftaran di bawah Undang-Undang ini;
- (d) diucapkan atau menggunakan sertifikat diubah atau dipalsukan dipalsukan dari pendaftaran berdasarkan Undang-Undang ini mengetahui sama telah dipalsukan, diubah atau dipalsukan;
- (e) impersonates seorang Arsitek Profesional, Arsitek lulusan, Bangunan Pembuat Skema atau Interior Designer;
- (f) membeli atau curang memperoleh sertifikat pendaftaran berdasarkan Undang-Undang ini dikeluarkan ke yang lain Arsitek Profesional, Arsitek Pascasarjana, Gedung Pembuat Skema, Interior Designer, konsultasi praktek arsitektur atau praktek desain interior konsultasi;
- (g) menjual sertifikat registrasi yang dikeluarkan di bawah Undang-Undang ini;
- (h) bertentangan dengan bagian 7, atau ayat 15A (6) atau 34B (5), akan dinyatakan bersalah karena pelanggaran dan akan, pada keyakinan, dikenakan denda paling banyak lima puluh ribu ringgit atau imprisonment untuk jangka waktu tidak melebihi dua tahun atau untuk keduanya.

Penalti Umum¹⁶

- (1) Setiap orang, kepemilikan kemitraan, tunggal atau badan hukum yang melanggar atau tidak mematuhi setiap ketentuan Undang-undang ini atau peraturan yang dibuat bawahnya akan dinyatakan bersalah karena pelanggaran dan di

¹⁵ Pasal 33 Arsitek Act 1967 junto Architect Aturan 1996

¹⁶ Pasal 34 Arsitek Act 1967 junto Architect Aturan 1996

mana hukuman tidak secara jelas diatur wajib, berdasarkan keyakinan, dikenakan denda paling banyak sepuluh ribu ringgit atau penjara tidak melebihi jangka waktu dua tahun atau untuk keduanya.

- (2) Jika kepemilikan tunggal, kemitraan atau badan bertentangan dengan perusahaan atau tidak mematuhi setiap ketentuan dari Undang-Undang atau peraturan yang dibuat bawahnya, pemilik tunggal atau setiap mitra, direktur, manajer, sekretaris atau petugas sejenis lainnya daripadanya akan berdosa terhadap pelanggaran dan dapat dikenakan hukuman yang sama dengan kemitraan, kepemilikan tunggal atau badan hukum adalah bersalah dan dikenakan, kecuali ia membuktikan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan tanpa, persetujuan pengetahuan atau diam-diam atau tidak timbul dari setiap kelalaian pada bagian.

C. PENUTUP

Tanggungjawab profesi arsitek dalam **hukum Indonesia** masih diatur dalam Kode Etik Arsitek Dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek yang dikeluarkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia sebagai kewajiban dan tanggung jawab seorang arsitek kepada masyarakat umum dan para pengguna jasa, yang mencakup 3 (tiga) hal yaitu:

- Kaidah Dasar merupakan kaidah pengarah secara luas sikap beretika seorang arsitek,
- Standar Etika merupakan tujuan yang lebih spesifik dan baku yang harus ditaati dan diterapkan oleh

anggota dalam bertindak dan berprofesi,

- Kaidah Tata Laku bersifat wajib untuk ditaati, pelanggaran terhadap kaidah tata laku akan dikenakan tindakan, sanksi keorganisasian.

Tanggungjawab profesi arsitek di Indonesia terlihat apabila terjadi hubungan kerja antara arsitek dengan pemberi tugas berdasarkan perjanjian kerja, sehingga terlihat tanggung jawab dikarena pekerjaan sebagai seorang arsitek.

Dalam melaksanakan tugasnya seorang arsitek, maka Dewan Kehormatan IAI memiliki tata kerja dan kode etik yang harus taati oleh seluruh anggota Dewan Kehormatan IAI pada lingkup nasional maupun daerah. Oleh karena itu apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh para arsitek, maka dewan kehormatan akan melakukan sanksi secara moral terhadap para arsitek tersebut dengan memberi sanksi pencabutan izin sebagai seorang arsitek.

Dalam **hukum Malaysia** telah di keluarkan sebuah undang-undang yang menyediakan registrasi dari arsitektur, kepemilikan tunggal, kemitraan dan badan hukum yang menyediakan layanan konsultasi arsitektural, designer interior dan juru bangunan serta masalah-masalah yang diatur dalam **ARSITEK ACT 1967**, diperbarui dengan **ARCHITECT ATURAN 1996** tentang pendaftaran arsitek, sehingga Setiap Arsitek Profesional, Lulusan Arsitek dan praktek konsultasi arsitektur harus tunduk pada UU ini.

Setiap arsitektur wajib di daftar Arsitek Profesional, Sarjana Arsitek dan praktek konsultasi arsitektur, sehingga setiap proses hukum, sertifikat pendaftaran akan menjadi bukti yang meyakinkan bahwa orang tersebut,

kepemilikan kemitraan, tunggal atau badan hukum bernama di dalamnya adalah seorang Arsitek Profesional, Sarjana Arsitek Interior Designer, Pembuat Skema Bangunan atau arsitektur atau interior desain praktek konsultasi.

Dalam menjalankan layanan konsultasi arsitektur dilakukan pengawasan oleh Dewan Arsitektur Malayasia, apabila seorang arsitek yang melanggar ketentuan yang sudah di UU, maka oleh Dewan Arsitektur dianggap sebagai pelanggaran dikenakan denda paling banyak sepuluh ribu ringgit atau penjara tidak melebihi jangka waktu dua tahun atau untuk keduanya.

D. DAFTAR PUSTAKA

Himpunan Etika Profesi, *Berbagai Kode Etik Asosiasi Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2006

Ikatan Arsitek Indonesia, *Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek*, Jakarta, 2007

-----, *Pedoman Hubungan Kerja antara Arsitek dan Pemberi Tugas*, Jakarta 2007

Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai, Etika Profesi dan Pekerjaan*, PT Buku Seru, Jakarta 2011

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1982

Architect Act Malaysia 1967

Architect Act Malaysia 1996